BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaporan SPT Masa PPN yang diperiksa sudah sesuai dengan buku bank perusahaan. Semua nominal yang terdapat di SPT Masa PPN sudah tercatat pada buku bank. Untuk penjualan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000, pembayarannya dua sampai tiga kali dalam jangka waktu dua bulan karena customer dari perusahaan ini selalu memesan tiap bulannya. Jadi, perusahaan tidak ‘khawatir’ akan kredit yang terlalu besar, sehingga customer dapat memesan lagi pada bulan berikutnya. Pada SPT Masa PPN juga dapat dilihat perusahaan tersebut mengalami kurang bayar atau lebih bayar. Perusahaan yang dianalisis mengalami lebih bayar yang memilih untuk restitusi pada akhir tahun.

Pemeriksaan dokumen untuk keperluan restitusi membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan prosedur yang panjang. Mulai dari KPP mengirim surat tugas untuk melakukan pemeriksaan hingga memeriksa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk restitusi. KPP mengirimkan surat tersebut secara langsung karena tahu PT. X lebih bayar. KPP mengetahui ini dari SPT PPN PT. X yang menunjukkan adanya lebih bayar dan permintaan PT. X untuk merestitusi PPNnya.

Pada saat orang dari KPP datang dengan membawa surat tugas, PT. X memberinya dokumen laporan keuangan perusahaan.

Seminggu kemudian, KPP mengirim surat dan list dokumen yang akan dipinjam. Dan dari sini, KAP mulai berkontribusi untuk membantu menyiapkan dan memeriksa dokumen sebelum diserahkan ke KPP. Kekurangan staf keuangan inilah yang membuat PT. X meminta jasa KAP untuk menyiapkan dan memeriksa dokumennya sebelum diserahkan ke KPP. Dokumen-dokumen yang disiapkan dan dibutuhkan oleh kantor pajak antara lain buku kas, buku bank, surat jalan, faktur penjualan, dan faktur pajak. Semua dokumen ini harus saling berhubungan. Dan memang menunjukkan bahwa memang benar terjadi lebih bayar atas pembayaran PPNnya.

Setelah semua dokumen siap, akan langsung diserahkan ke KPP untuk segera diperiksa. Dan apabila ada dokumen yang kurang, maka KPP akan mengirimkan surat beserta list dokumen yang kurang tersebut. PT. X akan menyiapkan data yang diperlukan tersebut. Setelah semua data diserahkan, PT. X harus menunggu sekitar enam hingga tujuh bulan untuk mengetahui restitusi tersebut diterima atau tidak.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya mengambil 3 (tiga) bulan SPT Masa PPN dikarenakan keterbatasan waktu studi praktik kerja atau magang. Tiga bulan SPT Masa PPN ini adalah pekerjaan yang dilakukan penulis selama tiga bulan studi praktik kerja. Semua data yang mendukung juga sesuai dengan bulan di SPT Masa PPN. Pada saat menyiapkan dan memeriksa dokumen yang diperlukan, juga

membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5 (lima) bulan dikarenakan dokumen yang diberikan perusahaan ke KAP juga lama dan tidak semua dokumen diberikan. Pada awalnya, perusahaan hanya memberi dokumen yang kita perlukan pertama kali yaitu buku kas dan faktur penjualan, sedangkan tim dari KAP terdiri dari 4 (empat) orang. Pemeriksaan terhadap buku kas dilakukan oleh 2 (dua) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya memeriksa faktur penjualan. Perusahaan ini lama dalam memberikan dokumen ke KAP dikarenakan staf keuangan di perusahaan tersebut terbatas yaitu hanya 2 (dua) orang dan dua orang ini yang mencari dan memberikan dokumen ke KAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak, 2012, *Kenali Aturan Dalam Pajak*. Diunduh dari www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Pajak Pertambahan Nilai 10%*, Jakarta: Dirjen Pajak
- Djoko, Muljono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai*, Yogyakarta: Andi
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono, 2014, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Jakarta: Salemba Empat
- Marina Supit, Wandha, David Paul Elia, dan Harijanto Sabijono, 2014, *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 3, September: 159-166
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang *Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomoer 72/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Sukardji, Untung, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat